

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT
KEMANDIRIAN DAERAH DI KABUPATEN MAGETAN
(TAHUN ANGGARAN 2009-2013)**

Sonia Fambayun
soniafambayun@gmail.com
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRACT

This purpose of research was to determine the performance of financial management and the degree of independence of Magetan regency area. Analyzer used to measure the performance of the financial management of local and the degree of independence of Magetan regency area is the ratio of financial independence area, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of the activity and growth ratio. The result of the analysis of the financial performance and the degree of independence of Magetan regency area in 2009-2013 showed that the ratio of financial independence area are instructive with an average of 6,84%, 120,62% effectiveness ratio which means it is very effective, the efficiency ratio is efficient with average amounted to 2,40%, the ratio of activity routine expenditure against APBD is 62,89% greater than the ratio of activity of development expenditure against APBD that only has an average of 26,08% and the growth ratio consist of PAD 17,88%, revenue amounted to 13,35%, 13,92% of routine expenditure and development expenditure amounted to 14,67%.

Keywords: financial performance, APBD, ratio analysis.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia maka setiap daerah telah diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Adapun tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah

bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya untuk memenuhi kebutuhan publik (Agustina: 2013).

Pengukuran kinerja sangatlah penting terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986 dalam Mariani (2013)).

Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah

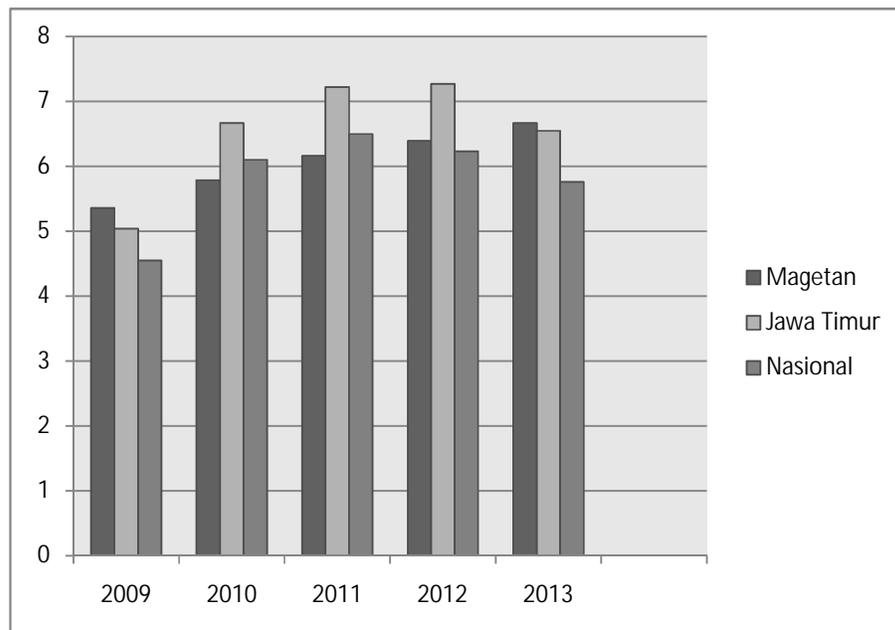
dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2007: 230).

Kabupaten Magetan sebagai kabupaten yang telah mengalami pemekaran wilayah juga berusaha untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Pemekaran daerah menurut UU no 32 tahun 2004 adalah pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pada tahun 2000 jumlah kecamatan di kabupaten Magetan berjumlah 13 kecamatan. Namun sampai dengan tahun 2010, jumlah kecamatan yang ada menjadi 17 kecamatan. (<http://magetanhc.blogspot.com/2012/12/pemerintahan-terjadi-pemekaran-wilayah.html>).

Adanya pemekaran wilayah tersebut juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten Magetan. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Magetan tahun 2009 sebesar 5,36% di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yakni sebesar 5,04% dan pertumbuhan Nasional sebesar 4,55%. Namun pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan ekonomi kabupaten Magetan di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi kabupaten Magetan sebesar 5,79%, Jawa Timur sebesar 6,67%, dan Nasional 6,10%. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi kabupaten Magetan sebesar

6,16%, sedangkan Jawa Timur sebesar 7,22% dan Nasional sebesar 6,50. Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi kabupaten Magetan sebesar 6,39% di atas pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 6,23%, namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 7,27%. Untuk tahun 2013, pertumbuhan ekonomi kabupaten Magetan meningkat sebesar 6,67% di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 6,55% dan Nasional yang hanya 5,78%

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Kab Magetan 2009-2013



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014

Data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten Magetan telah mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

Berikut adalah perbandingan beberapa indikator ekonomi se-bakorwil I Jatim tahun 2013.

Tabel 1. Perbandingan indikator ekonomi se-bakorwil I Jatim 2013

Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Triliun Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Perkapita (Juta Rp)
Kab. Pacitan	4,823	6,02	8,81
Kab. Ponorogo	10,692	5,67	12,38
Kab. Madiun	9,954	6,37	14,81
Kab. Magetan	10,598	6,67	15,83
Kab. Ngawi	10,331	6,98	12,53
Kota Madiun	7,327	8,07	42,09

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa PDRB ADHB kabupaten Magetan merupakan PDRB ADHB terbesar kedua se-bakorwil I Jatim setelah kabupaten Ponorogo yakni sebesar Rp 10,598 triliun. Untuk pertumbuhan ekonomi, kabupaten Magetan menempati urutan ke-3 dengan nilai sebesar 6,67%. Untuk PDRB Perkapita, kabupaten Magetan memiliki PDRB Perkapita terbesar kedua setelah Kota Madiun senilai Rp 15,83 juta.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan kabupaten Magetan sebagai objek penelitian, agar dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah setelah adanya pemekaran wilayah. Penulis melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magetan (Tahun Anggaran 2009-2013)”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan yang diteliti dan dianalisis sebagai berikut:

“Bagaimana kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian di kabupaten Magetan (Tahun Anggaran 2009-2013)?”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian di kabupaten Magetan (Tahun Anggaran 2009-2013).

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang diatur pada Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Asas-asas yang berkaitan dengan tingkat kemandirian daerah tersebut adalah terletak pada asas efisiensi dan asas efektivitas. Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

APBD

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.
 - 1) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.
- b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Kelompok belanja terdiri atas:
 - 1) Belanja administrasi umum (belanja tak langsung) adalah belanja yang secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.

- 2) Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
 - 3) Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset.
 - 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan.
 - 5) Belanja tak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan di luar rencana, seperti terjadinya bencana alam.
- c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. (Mariani, 2013).

Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud antara lain (Ihlayul Ulum, 2005:276):

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan cara berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- b. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Rasio Kemandirian Daerah

Menurut Halim (2002), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,

semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Hersey dan Kenneth (dalam Halim, 2001:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu poladi mana peranan pemerintah semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti berikut (Mahsun, 2006:187):

Tabel 2. Kriteria pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta kemampuan keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Mahsun Moh, 2006

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. (Halim, 2002:129)

Berikut ini adalah kriteria penilaian efektivitas kinerja keuangan menurut Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996:

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% - ke atas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Kriteria penilaian efisiensi kinerja keuangan menurut Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% - ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 600.900.327 tahun 1996

Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio KKD: } \frac{\text{Penadapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Menghitung rasio efektivitas berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

3. Menghitung rasio efisiensi berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Menghitung rasio aktivitas terdiri dari

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

5. Menghitung rasio pertumbuhan terdiri dari

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun p} - \text{PAD tahun p-1}}{\text{PAD tahun p-1}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan} \\ = \frac{\text{Pendapatan tahun p} - \text{pendapatan tahun p-1}}{\text{Pendapatan tahun p-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pertumbuhan Belanja Rutin Daerah} \\ = \frac{\text{Belanja rutin tahun p} - \text{belanja rutin tahun p-1}}{\text{Belanja rutin tahun p-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase Pertumbuhan Belanja Pembangunan Daerah} = \frac{\text{blj pembangunan tahun p} - \text{blj pembangunan tahun p-1}}{\text{Belanja pembangunan tahun p-1}} \times 100\%$$

HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja keuangan dan tingkat kemandirian daerah di kabupaten Magetan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2009-2013.

Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio sebagai berikut:

Rasio Tingkat Kemandirian Daerah

Rasio tingkat kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Rasio ini diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total pendapatan yang diterima pemerintah daerah.

Tabel 5. Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Magetan 2009-2013

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Keterangan
2009	48.831.608.000	721.622.950.000	6,77	Instruktif
2010	51.964.929.000	800.186.652.000	6,49	Instruktif
2011	61.966.145.000	952.223.122.000	6,51	Instruktif
2012	78.444.432.000	1.083.896.156.000	7,24	Instruktif
2013	87.859.708.000	1.225.384.220.297	7,17	Instruktif
Rata-rata	65.813.364.400	956.662.620.059,4	6,84	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014 (diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan di atas, rasio kemandirian daerah kabupaten Magetan cenderung mengalami peningkatan namun berfluktuatif. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2009 s/d 2013 masih sangat rendah dengan rata-rata 6,84% kurang dari 25%, yaitu pada tahun 2009 sebesar 6,77%, pada tahun 2010 sebesar 6,49%, tahun 2011 sebesar 6,51%, tahun 2012 sebesar 7,24%, dan tahun 2013 sebesar 7,17%.

Turunnya rasio kemandirian pada tahun 2010 disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah yang pada tahun 2009 terealisasi sebesar Rp 8.034.047.000,00 dan Rp 27.565.482.000,00 , sedangkan pada tahun 2010 terealisasi hanya sebesar Rp 7.690.169.000,00 dan Rp 9.313.009.000,00. Kemudian kenaikan pada tahun 2011 dan 2012 rasio kemandirian meningkat karena realisasi pos-pos PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan.

Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Tabel 6. Rasio Efektivitas Daerah Kabupaten Magetan 2009-2013

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio (%)	Keterangan
-------	-----------------	--------------------	-----------	------------

2009	38.248.000.000	48.831.608.000	127,67	Sangat efektif
2010	45.000.200.000	51.964.929.000	115,48	Sangat efektif
2011	54.217.720.000	61.966.145.000	114,29	Sangat efektif
2012	61.417.896.000	78.444.432.000	127,72	Sangat efektif
2013	74.500.000.000	87.859.708.000	117,93	Sangat efektif
Rata-rata	54.676.763.200	65.813.364.400	120,62	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014 (diolah)

Dari perhitungan rasio efektivitas di atas, efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Magetan sangat efektif sebab realisasi PAD di atas 100% yaitu rata-rata dari tahun 2009-2013 sebesar 120,62% seperti pada tahun 2009 yakni sebesar 127,67%. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 rasio kemandirian masih di atas 100% namun mengalami penurunan yaitu sebesar 115,48% pada tahun 2010 dan turun lagi sebesar 114,29% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 efektivitas pengelolaan keuangan meningkat menjadi 127,72%. Namun, pada tahun 2013 efektivitas pengelolaan keuangan kembali menurun sebesar 117,93%. Secara umum, efektivitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Magetan tahun 2009-2013 cukup baik sebab realisasinya sudah di atas 100%.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Tabel 7. Rasio Efisiensi Daerah Kabupaten Magetan 2009-2013

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Rasio (%)	Keterangan
2009	48.831.608.000	1.629.294.044	3,34	Sangat efisien
2010	51.964.929.000	1.136.487.848	2,19	Sangat efisien
2011	61.966.145.000	1.288.323.898	2,08	Sangat efisien

2012	78.444.432.000	1.508.311.786	1,92	Sangat efisien
2013	87.859.708.000	2.175.506.536	2,48	Sangat efisien
Rata-rata	65.813.364.400	1.547.584.822	2,40	

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014 (diolah)

Dari perhitungan rasio efisiensi dapat dilihat bahwa efisien pengelolaan keuangan daerah kabupaten Magetan sudah baik sebab besarnya rasio efisiensi di bawah 60%. Pada tahun 2009-2012 rasio efisiensi terus mengalami penurunan. Pada tahun 2009 rasio efisiensi sebesar 3,34%, pada tahun 2010 sebesar 2,19%, tahun 2011 sebesar 2,08%, dan tahun 2012 sebesar 1,92%. Namun pada tahun 2013 justru meningkat sebesar 2,48% dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan besarnya pengeluaran atau biaya untuk memungut PAD di tahun 2013 belum mampu merealisasikan penerimaan PAD secara lebih maksimal dibanding tahun sebelumnya.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau pada belanja pembangunan secara optimal.

Tabel 8. Rasio aktivitas daerah kabupaten Magetan 2009-2013

Tahun	APBD (Rp)	Belanja Rutin (Rp)	Belanja Pembangunan (Rp)	Belanja Rutin Terhadap APBD (%)	Belanja Pembangunan Terhadap APBD (%)
2009	825.576.416.000	485.425.424.000	245.190.255.000	58,80	29,70
2010	891.965.929.000	590.340.835.000	189.155.534.000	66,18	21,21
2011	1.064.464.742.000	656.149.460.000	304.469.635.000	61,64	28,60
2012	1.182.086.295.000	769.285.749.000	295.368.214.000	65,08	24,99
2013	1.340.641.003.570	841.556.549.055	347.097.781.716	62,77	25,89
Rata-rata	1.060.946.877.114	668.551.603.411	276.256.283.943	62,89	26,08

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014 (diolah)

Dari perhitungan rasio aktivitas di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin (belanja tidak langsung). Selama kurun waktu 5 tahun yakni pada tahun 2009 s/d 2013 rata-rata rasio aktivitas belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja pembangunan (belanja langsung) yaitu sebesar 62,89% untuk rasio aktivitas belanja rutin, sedangkan rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan hanya sebesar 26,08%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Magetan lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan. Maka diperlukan minimalisasi anggaran untuk belanja rutin guna dialokasikan untuk belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat kabupaten Magetan.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkannya keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Tabel 9. Data Analisis Rasio Pertumbuhan Realisasi PAD, Realisasi Penerimaan Pendapatan, Realisasi Belanja Rutin, dan Realisasi Belanja Pembangunan Kabupaten Magetan 2009-2013

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja Rutin (Rp)	Realisasi Belanja Pembangunan (Rp)
2009	48.831.608.000	721.622.950.000	485.425.424.000	245.190.255.000
2010	51.964.929.000	800.186.652.000	590.340.835.000	189.155.534.000
2011	61.966.145.000	952.223.122.000	656.149.460.000	304.469.635.000
2012	78.444.432.000	1.083.896.156.000	769.285.749.000	295.368.214.000
2013	87.859.707.871	1.225.384.220.297	841.556.579.055	347.097.781.716
Rata-rata	65.813.364.374	956.662.620.059,4	668.551.609.411	276.256.283.943,2

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014 (diolah)

Tabel 9 merupakan data analisis rasio pertumbuhan realisasi PAD, realisasi penerimaan pendapatan, realisasi belanja rutin, dan realisasi belanja pembangunan

kabupaten Magetan tahun anggaran 2009-2013. Sedangkan tabel 10 adalah hasil analisis rasio pertumbuhan APBD kabupaten Magetan tahun anggaran 2009-2013.

Tabel 10. Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Magetan 2009-2013

Tahun	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin (%)	Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan (%)
2009	25,15	9,96	10,22	20,72
2010	6,42	10,89	21,61	-22,85
2011	19,25	19,00	11,15	60,96
2012	26,59	13,83	17,24	-2,99
2013	12,00	13,05	9,39	17,51
Rata-rata	17,88	13,35	13,92	14,67

Sumber: data diolah penulis

Pertumbuhan APBD kabupaten Magetan tahun anggaran 2009 s/d 2013 menunjukkan pertumbuhan positif terutama pertumbuhan PAD mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2010 dan 2013 mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,42% dan 12,00%. Penurunan pada tahun 2010 disebabkan turunnya realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibanding tahun 2009. Pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2010 hanya sebesar Rp 7.690.169,0 dan Rp 9.313.009,0 sedangkan tahun 2009 sebesar Rp 8.034.047,0 dan Rp 27.565.482,0. Pertumbuhan pendapatan kabupaten Magetan berfluktuatif dimana mengalami peningkatan rasio pertumbuhan dari tahun 2009 s/d 2011 yaitu dari 9,96% pada tahun 2009 naik menjadi 10,89% di tahun 2010 dan naik lagi sebesar 19,00% di tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, rasio pertumbuhan turun menjadi 13,83% dan turun kembali sebesar 13,05% di tahun 2013.

Selain pendapatan, pertumbuhan belanja pemerintah daerah kabupaten Magetan yang terdiri dari belanja rutin (belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja langsung) juga mengalami pertumbuhan. Belanja rutin

maupun belanja pembangunan daerah kabupaten Magetan sama-sama memiliki rasio pertumbuhan yang berfluktuatif. Rasio pertumbuhan belanja rutin meningkat di tahun 2010 sebesar 21,61% dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar 10,22%. Ini disebabkan pos-pos belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang mengalami kenaikan akibat pertumbuhan belanja pembangunan yang menurun. Pada tahun 2011, rasio pertumbuhan belanja rutin kembali turun sebesar 11,15% dan naik lagi di tahun 2012 sebesar 17,24%. Namun, rasio pertumbuhan belanja rutin kembali turun di tahun 2013 sebesar 9,24%.

Dari analisis rasio pertumbuhan di atas, rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan kabupaten Magetan baik karena pemerintah daerah kabupaten Magetan mampu meningkatkan pertumbuhan PAD dan pendapatan daerahnya. Selain itu, rasio pertumbuhan belanja rutin juga mengalami *trend* positif, namun kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk pembiayaan belanja pembangunan masih sangat rendah karena rasio pertumbuhannya mengalami *trend* negatif. Maka pemerintah daerah kabupaten Magetan diharapkan dapat meminimalisasi anggaran untuk belanja rutin, agar pengalokasian untuk belanja pembangunan dapat lebih maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dengan tersedianya sarana dan prasarana.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah kabupaten Magetan

berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Hal tersebut terlihat dari rasio kemandirian daerah kabupaten Magetan yang walaupun memiliki rata-rata yang masih rendah yakni sebesar 6,84%, namun secara keseluruhan rasio kemandirian telah mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Rasio efektivitas persentase rata-ratanya sebesar 120,62% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif, rasio efisiensi kabupaten Magetan persentase rata-ratanya 2,40% yang berarti pemerintah kabupaten Magetan sangat efisien dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal. Sedangkan dari rasio aktivitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Magetan masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin (belanja tak langsung) dibandingkan untuk belanja pembangunan (belanja langsung). Rasio pertumbuhan kabupaten Magetan menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Magetan mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami *trend* positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami *trend* negatif (Belanja Daerah).

Saran

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD kabupaten Magetan serta kesimpulan di atas, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Magetan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Magetan harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan

yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Propinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).

2. Pemerintah kabupaten Magetan agar lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja rutin (belanja tak langsung) dan meningkatkan belanja pembangunan (belanja langsung).

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*
- _____. *UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- _____. *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- _____. *UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- _____. *UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*
- _____. *UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*
- _____. *UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.*
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi 3, Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Agustina, Oesi. 2013. *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

- Mariani, Lidia. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah*. Artikel Ilmiah Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Damanhuri, Zulkifly Prabowo. ... *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Ulum, Ihyaul. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: UMM Press.
- Bisma dan Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. GaneÇ Swara, Vol. 4, No.3, Desember 2010.
- Wahyuni, Nanik. ... *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang.
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014.